

Kamis, 8 Desember 2011

BERKAT
BERITAKHATULISTIWA

Awasi Pelaporan Anggaran SKPD Kota

Pontianak, BERKAT.

Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Herri Mustamin mengatakan, selama ini hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Pontianak selalu menyebutkan tidak ada permasalahan.

“Padahal nyatanya, setelah di BPK justru menemukan masalah terkait sistem laporan pengelolaan keuangan daerah. Aneh juga kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah ada perbedaan persepsi antara

BPK dengan Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan. Inspektorat seharusnya bisa menjadikan ini pelajaran untuk lebih mengawasi SKPD, terutama dalam pelaporan keuangan SKPD, terutama yang mencurigakan apalagi ini menjelang akhir tahun,” katanya, belum lama ini.

Dengan adanya perbedaan tersebut, kata Herri, opini yang berkembang di masyarakat, lebih baik Inspektorat itu

dibubarkan, karena menjadikan laporan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik.

“Selain itu, muncul pula kecurigaan kalau Inspektorat ini mendapat intervensi yang mengharuskan menyampaikan yang baik-baik saja,” tegasnya.

Menurutnya, Inspektorat Kota Pontianak, selaku pengawas internal laporan pengelolaan keuangan daerah seharusnya lebih baik ketimbang Badan

Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

“Jangan sampai Inspektorat bilang tidak ada temuan dalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, red), tetapi tiba-tiba di BPK ada temuan,” ingatnya.

Menurutnya, perbedaan hasil pengawasan itu terjadi, tentunya akan merusak atau menurunkan citra Inspektorat Kota Pontianak.

“Jangan sampai Inspektorat sebagai pengawas justru yang harus diawasi, makanya kita minta Inspektirat jangan sampai kecolongan, sehingga nantinya bisa menjadi temuan BPK,” katanya lagi. (wti)